

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan kebiakan pemerintah dalam pelaksanaan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) oleh PT Taspen Cabang Bandung, mengacu pada Peraturan Pemerintah NO. 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian yang merupakan Hak bagi Aparatur Sipil Negara yang mengalami kecelakaan agar merasa keselamatannya terjaga dan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis pendekatan aplikasi teori berdasarkan model imlementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III menunjuk pada empat variabel implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

- a. Pada konteks komunikasi dengan ASN diperlukannya wawasan pada pelaksana untuk mensosialisasikan kebijakan sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai program yang telah disosialisaikan oleh PT Taspen Cabang Bandung.
- b. Pada konteks sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa masih kurangnya wawasan mengenai

- program JKK yang merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan untuk mensosialisasikan program tersebut.
- c. Pada konteks disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari program JKK. Disposisi berkaitan dengan komitmen yang dijalankan sesuai dengan tujuan atau perubahan yang ingin dicapai. Hal ini salah satu yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan apabila sikap dari pelaksana tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan.
 - d. Dalam konteks Struktur Birokrasi untuk pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program JKK di PT Taspen Cabang Bandung sesuai dengan SOP yang menjelaskan keterkaitan pada setiap unit-unit organisasi, yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Taspen Cabang Bandung terdapat faktor pendukung dan penghambat. Upaya yang dilakukan PT Taspen Cabang Bandung untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan Program JKK antara lain: memberikan Kartu JKK untuk mengantisipasi keselamatan bagi ASN yang membutuhkan pertolongan karena mengalami kecelakaan, memaksimalkan dalam meningkatkan mutu SDM yang tersedia dan menggali potensi seluruh pihak yang terkait.

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

- a. Dalam pelaksanaan Program JKK di PT Taspen Cabang Bandung masih menyisahkan faktorlain untuk penelitian di bidang yang berbeda diluar implementasi kebijakan. Peneliti pada tinjauan implementasi kebijakan publik tentang Pelaksanaan Program JKK merupakan variabel yang penting untuk melengkapi model implementasi kebijakan, agar program pemerintah dalam pendekatan dari atas tetapi secara objektif untuk meningkatkan kualitas program JKK.
- b. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambahkan variabel yang lainnya selaim implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komperatif dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pemerintahan khususnya kajian kebijakan pemerintah.

5.2.2. Praktis

1. Bagi staff atau SDM di PT Taspen Cabang Bandung lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiatr dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang menjadi tujuan sehingga implementasinya lebih

optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi pelaksanaan program JKK.

2. Pemerintah melakukan koordinasi dengan Taspen pusat sehingga dengan adanya perubahan kebijakan pegawai dengan mudah mempelajari program yang akan dijalankan sehingga implementasi kebijakan dapat tersalurkan dengan baik.
3. Pengelolaan klaim lebih dioptimalkan sehingga bagi ASN yang mengalami kecelakaan, agar cepat diitangani dengan baik.